



## PENDIDIKAN POLRI SEBAGAI PEMBANGUN POLISI SIPIL (STUDI PADA AKADEMI KEPOLISIAN)

**Subagyo\***

Dosen Jurusan Sejarah FIS-Unnes

### Info Artikel

#### Keywords:

Constitutional Court,  
constitutional rights, human  
rights, citizens

### Abstract

*Police at this time not only have the duty as a “crime hunter” and “law enforcement”, but they are required to act as a “problem solving oriented team, maintaining order officers, public servant, public observer and chief executive officer” who are solid in pluralism and social problems in the community. That is part of the efforts to change the old culture of police officers and build civilian character of police. Building a new culture can be started by setting up Police Academy officer with civilian character. Departing from the strategic issues, empirical research on the Police Academy Tarun and devices that contribute to the development of civilian police as the educational system, training and care at the Police Academy are required. Problems discussed in this research are: (1) How far the Police Academy Taruna has an understanding on civilian police? (2) how much education / teaching contributed to the development of civilian police? (3) How much training gave effect on the development of civilian police? (4) how parenting affects the development of the civilian police? The purpose of this study are: (1) Knowing the understanding of the Police Academy Taruna on Civilian Police; (2) Knowing that education / teaching contributed to the development of civilian police, (3) Knowing that training influence on the development of civilian police, (4) Knowing that parenting influence the development of civilian police.*

*This study uses a quantitative approach. Target of the research is the Police Academy Taruna level II and III. Samples of the research is conducted by using stratified proportional random sampling. The independent variable comprised three variables, namely Education / Teaching, training, and parenting. Dependent variable is the Civilian Police. The data collection was done by using a questionnaire, collecting the relevant documents and interviews. Data were analyzed with regression techniques. Results showed that education / teaching, training and parenting together contribute positively to the development of the Civilian Police with significance level 0.05 with  $F = 23.916$  count is greater than the  $F$  table = 3.943. It can be concluded that the education / teaching, training and parenting give a positive contribution to the process of building a civilian character to Police Academy Taruna. Based on the results of these studies, it is suggested that in order to support the development of civilian police to the Police Academy Taruna in Indonesia, it is required a process of education / teaching, training and nurturing that consistently have to really put forward the principles that form a picture of civilian police, so that in the future, these three things can be a guidance / reference in creating the Police Academy Tarun with police civilian character.*

© 2012 Universitas Negeri Semarang

## PENDAHULUAN

Reformasi dalam tubuh Polri merupakan tuntutan yang tidak dapat ditunda lagi, karena masyarakat telah memiliki kesadaran yang tinggi terhadap keberadaan polisinya. Perubahan dalam organisasi Polri mencakup 3 (tiga) aspek yang mendasar yaitu instrumenal, struktural dan kultural. Proses perubahan tersebut diharapkan dapat membawa pengaruh terhadap pembangunan polisi sipil. Sebagai sarana yang strategis dalam membangun polisi sipil adalah melalui lembaga pendidikan.

Suatu negara akan memiliki kepolisian yang baik jika masyarakat yang bersangkutan baik pula, demikian kata mantan Kapolri Jenderal Awaloedin Djamin (1991). Mengutip pendapat Sullivan, Awaloedin mengatakan bahwa untuk memiliki sistem organisasi kepolisian yang baik dan kuat, diperlukan pula personil polisi yang memiliki : 1) motivasi yang kuat untuk menjadi polisi yang baik (*well motivated*); 2) pendidikan yang baik (*well educated*); 3) mendapatkan pelatihan yang baik (*well trained*); dan 4) memiliki peralatan untuk menunjang operasi yang baik (*well equipped*).

Pendapat Sullivan tersebut berdasarkan cara pandang internal. Sedangkan dari cara pandang eksternal, Walter C. Reckless dalam bukunya "*The Crime Problems*" mengatakan bahwa suatu negara akan memiliki rakyat dengan disiplin yang tinggi jika terpenuhi lima syarat, yakni : 1). Sistem dan organisasi kepolisian yang kuat; 2) hukum yang berwibawa; 3) peradilan yang

efektif; 4) persepsi birokrasi yang baik; dan 5) budaya masyarakat yang mendukung.

Menurut Nurfaizi (1995) menunjukkan bahwa tugas polisi amat berat dan tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada. Mengambil perbandingan jumlah hakim dan jaksa di Jakarta Barat yang rata-rata hanya memegang satu perkara sampai tuntas, sebaliknya jumlah personil Polri yang jumlahnya 232 orang harus menangani berbagai perkara, bahkan ikut pengamanan tamu negara, patroli, reserse, mengejar penjahat, melakukan penyidikan, penyelidikan, dan sebagainya. Beratnya jumlah kasus yang harus ditangani ditambah lagi dengan sistem pendidikan Polri yang masih perlu dikembangkan untuk mampu menangani permasalahan yang dihadapi.

Dari sisi internal, Jenderal Pol Kunarto (1995) juga menyadari bahwa sistem pendidikan di tubuh Polri masih sangat memprihatinkan. Menurutnya ada beberapa kelemahan pokok dalam sistem pendidikan Polri diantaranya : 1) seleksi calon belum maksimal objektif sehingga Polri tidak mendapatkan bibit-bibit yang baik. 2) ada kecenderungan untuk menempatkan orang-orang yang tidak terpuji di lapangan ke dunia pendidikan (yang kering materi). Seolah-olah pendidikan sebagai "tempat buangan"; 3) bahan ajar belum maksimal baik, dan 4) Taruna/siswa cenderung mengejar ijazah untuk meraih pangkat dan jabatan dan bukan kepada ilmu.

Pada sisi yang lain, jenis-jenis kejahatan berkembang pesat kualitasnya terutama yang berkaitan dengan "*white collar crime*". Kejahatan narkoba dan perbankan misalnya melibatkan jaringan internasional yang

menggunakan peralatan komputer dan komunikasi yang canggih serta manajemen kejahatan yang amat rapi. Kalau Polri ketinggalan manajemen dan peralatannya dengan para penjahat besar, maka dipastikan Polri akan kesulitan dalam memberantas kejahatan semacam itu.

Jenderal Kunarto (1995) berpendapat bahwa kelemahan pokok polisi di Indonesia adalah ; 1) rata-rata tidak peka dan tanggap pada tuntutan masyarakat ; 2) tidak tekun dan cepat memantau situasi; 3) bersikap konservatif dan birokratis yang kadang berlebihan : 4) kurang inisiatif, tidak kreatif-inovatif dan terjebak pada rutinitas kerja; 5) sulit menginterpretasi kebijakan pimpinan; 6) tidak memanfaatkan potensi dan peluang lingkungan demi suksesnya tugas; 7) bekerja tidak selalu efektif dan efisien; dan 8) menyimpang dari etika keperwiraan.

Terkait dengan tugas polisi untuk menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat, nampaknya tidak mudah untuk menciptakan ketertiban umum karena polisi kadang-kadang harus menghadapi hal-hal yang saling bertentangan. Studi dari Skolnick dalam bukunya *Justice Without Trial* (1966) disebutkan bahwa berkaitan dengan tugas-tugas polisi sebagai pelayan ketertiban umum di satu pihak dan penerap hukum pidana di pihak lain, sering menimbulkan semacam diskresi. Artinya akan berbeda antara *law in the books* dan *law in the action*.

Polisi tidak hanya mengemban tugas sebagai “*crime hunter*” dan “*law enforcement*” belaka, namun juga wajib tampil dan mengemuka sebagai panutan publik, bahkan dituntut untuk berlaku

sebagai “*problem solving oriented, order maintaining officer, public service, publik observe, dan chief executive officer*” yang solid dalam kemajemukan dan permasalahan sosial masyarakat.

Untuk mendukung kompetensi polisi seperti di atas perlu didukung oleh berbagai faktor, seperti 1) pemilikan motivasi yang kuat, 2) pencapaian pendidikan yang baik, 3) perolehan pelatihan yang baik, 4) dukungan peralatan guna menunjang operasi yang baik, dan 5) tingkat kesejahteraan yang memadai.

Keterkaitan di antara faktor-faktor tersebut dapat dipahami dari penjelasan berikut. Setelah ada individu yang memiliki motivasi yang baik untuk mengabdikan hidupnya sebagai polisi, maka diperlukan suatu sistem pendidikan kepolisian yang bermutu. Artinya pendidikan menjadi fokus yang amat penting. Hal ini disadari sepenuhnya oleh pimpinan Polri. Berbagai perubahan telah dilakukan di tingkat-tingkat pendidikan Polri. Misalnya, telah dapat dilihat adanya perubahan kurikulum yang cukup jauh berbeda dari produk orde baru.

Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana baru untuk mendukung sistem pendidikan merupakan bukti adanya upaya nyata yang telah dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Berbagai upaya itu tentu memerlukan dana yang tidak sedikit. Bahkan, studi yang telah dilakukan oleh kelompok kerja pengkajian dan pengembangan Akademi Kepolisian (Pokja Jianbang Akpol) pada tahun 2002 dalam rangka *self reflection* merupakan bukti pula dari kesadaran di lingkungan Polri untuk merefleksikan apa yang telah dan belum

dicapai dan bagaimana langkah ke depan yang perlu dilakukan oleh lembaga pendidikan kepolisian.

Lembaga ini dipandang sebagai salah satu unsur penting bagi terwujudnya perubahan budaya polisi yang berkembang kemampuannya, sikap, tingkah laku, dan tanggung jawab di dalam masyarakat tempat mereka menjalankan tugasnya. Berbagai upaya strategis itu bermuara pada sasaran Polri yang berkualitas. Namun demikian, sejauh ini belum diketahui apakah kualitas perwira Polri yang akan menduduki polisi *first line supervisor* dalam jajaran Polri telah sesuai dengan yang diharapkan negara yang telah mengeluarkan investasi yang besar untuk mempersiapkannya. Sementara itu, data empiris tentang kualitas calon perwira Polri di lapangan dipandang memiliki makna yang strategis dalam membangun kultur Polisi sipil.

Apabila usaha mengubah kultur anggota Polri dipandang sangat penting sekaligus sulit dilakukan, maka kehadiran calon perwira Polri di tengah-tengah jajaran Polri menjadi sangat strategis sifatnya. Peningkatan kemampuan, pemberdayaan, dan peran mereka sangat penting untuk memulai perubahan kultur tersebut, mengingat kedudukannya sebagai calon pemimpin yang terdepan di lapangan dan di bawah langsung para atasan mereka yang memiliki jarak latar belakang kultur dengan tampilan Perwira. Mengubah kultur seluruh anggota dan calon Polri dapat ditempuh dengan berbagai cara dan dapat dimulai dari berbagai tingkat untuk menuju perubahan di semua tingkat. Dalam kajian ini dipilih Taruna Akpol sebagai calon perwira Polri

sebagai fokus kajian.

Pilihan pada calon perwira Polri antara lain adalah didasarkan sekurang-kurangnya pada tiga pertimbangan berikut, adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Polri, sosok dan eksistensi Perwira yang intelek yang berperan di masyarakat, dan relatif masih memiliki idealisme dan semangat kerja yang tinggi di samping secara relatif belum terkontaminasi oleh berbagai intervensi yang kurang mendukung idealismenya. Selain itu, realitas menunjukkan bahwa para calon perwira Polri yang nantinya merupakan eksekutif dan sekaligus pemimpin (kecil) di garis terdepan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian.

Dari seluruh uraian di atas dapat dirasakan begitu perlunya untuk segera dilakukan suatu penelitian empiris terhadap para Taruna calon perwira Polri tersebut. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dalam upaya membangun Polisi Sipil, yang pada gilirannya diperhitungkan mampu memberikan sumbangan masukan yang strategis bagi perbaikan pendidikan para calon perwira Polri. Karena para calon perwira akan menduduki posisi strategis bagi perbaikan manajemen dan organisasi Polri demi kemandirian dan profesionalismenya. Selain itu, penelitian ini dirasa penting mengingat bagaimanapun suatu organisasi kepolisian akan tidak berdaya, bahkan merupakan barang yang mati manakala tidak dipimpin oleh para pelaksana yang memiliki kepemimpinan yang dapat memaksa dan mendorongnya sebagai kekuatan yang dinamis dan mampu mencapai tujuannya (More 1987: 240).

Akademi Kepolisian sebagai salah satu lembaga pendidikan Polri merupakan tempat menyiapkan calon-calon pimpinan Polri dimasa datang, diharapkan menjadi tempat pembangun polisi sipil sesuai harapan masyarakat. Proses pendidikan di Akpol menjadi tumpuan perubahan kultur polisi pada posisinya sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta menghargai hak-hak asasi manusia.

Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Seberapa jauh Taruna Akpol memiliki pemahaman mengenai polisi sipil?, (2) Seberapa besar pendidikan/pengajaran memberikan kontribusi terhadap pembangunan polisi sipil?, (3) Seberapa besar pelatihan berpengaruh terhadap pembangunan polisi sipil?, dan (4) Seberapa besar pengasuhan berpengaruh terhadap pembangunan polisi sipil?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui pemahaman Taruna Akpol mengenai polisi sipil, (2) mengetahui pendidikan/pengajaran memberikan kontribusi terhadap pembangunan polisi sipil., (3) mengetahui pelatihan berpengaruh terhadap pembangunan polisi sipil, dan (4) mengetahui pengasuhan berpengaruh terhadap pembangunan polisi sipil.

Polisi sipil, selain sebagai paradigma, juga merupakan tujuan dari reformasi di lingkungan Polri. Oleh karena itu, pada dasarnya perubahan-perubahan yang dilaksanakan tidak dapat dilakukan secara parsial tetapi secara simultan, sehingga akan menghasilkan sinergi yang menjadi percepatan dalam mencapai tujuan yaitu terwujudnya polisi sipil. Beberapa parameter

yang menjadi indikator polisi sipil, yakni: profesional dan proposional, demokratis, menjunjung tinggi HAM, transparan, akuntabel, menjunjung tinggi supremasi hukum dan bersikap protagonis. Oleh karenanya perubahan struktural harus diikuti dengan perubahan instrumenal dan kultural.

Reformasi Polri menuju polisi sipil dan demokratis, peran dan fungsinya adalah memberikan pelayanan keamanan dengan tujuan melindungi harkat dan martabat manusia sehingga dapat melakukan produktivitasnya dengan aman. Dapat dikatakan peranan fungsi Polri yang hakiki adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menyadari bahwa sumber daya manusia sebagai aset utama bangsa. Profesionalisme Polri merupakan landasan agar Polri mampu menyajikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya, serta mendapatkan tempat dan dukungan dari masyarakat polisi sipil, yaitu polisi masa depan yang lebih diwakili oleh pelayanan (*service*) dari pada kekuatan (*force*). Konstelasi tersebut berhubungan dengan kecenderungan sosial politik Indonesia yang menuju kepada demokrasi dan pembangunan *civil society* (Iskandar, 2007:4).

Pembangunan polisi Indonesia masa depan, yaitu: Pertama, reformasi sebaiknya dimulai dengan menanyakan kesediaan bangsa Indonesia sendiri untuk “membiayai polisi-polisinya”. Keamanan itu tidak cuma-cuma, karena ada “*the price of safety*”. Selama ini, masyarakat Indonesia masih lebih banyak menuntut daripada mengerti. Kedua, reformasi menjadi sipil. Ciri penting dari reformasi kepolisian Indonesia adalah

menjadikannya suatu kekuatan yang lebih sipil daripada militer. Kualitas menjadi sipil ini diharapkan sudah mewedahi dan merespon sekalian tantangan yang akan dihadapi oleh POLRI masa depan, seperti pembangunan masyarakat warga, hak asasi mausia dan sebagainya.

Ketiga, reformasi POLRI memang akan panjang dan memakan waktu lama, bahkan ada yang meramalkan butuh waktu satu generasi. Kendatipun lama, kalau kita tidak secara determinatif memulainya, maka ia hanya akan menjadi semakin lama lagi. Ramalan tersebut dapat dimengerti, karena reformasi POLRI yang kita hadapi bukan perubahan kecil atau sedang. POLRI kita sudah terlalu lama berada dalam “keadaan rusak” dan “dirusak”, oleh karena itu pembangunannya juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Keempat, dalam suasana mendesak seperti sekarang ini, dihadapkan kepada dua pilihan prioritas yaitu (1) manusia atau (2) materiil/fisik. Pilihannya adalah cenderung untuk mendahulukan pembangunan manusia-manusia polisi Indonesia. Sudah barang tentu pilihan tersebut tidak mengabaikan pengadaan perlengkapan, khususnya yang bersifat vital. Memang dalam keadaan POLRI yang sudah terlalu “miskin” ini, pilihan antara kedua hal tersebut di atas sulit dilakukan.

Kelima, dengan membuat pilihan tersebut maka pendidikan dan pelatihan menjadi primadona. Sehubungan dengan pendidikan, rekrutmen juga diperbaiki untuk mendapatkan manusia-manusia yang “cocok untuk pekerjaan polisi”. Keenam, suatu pilihan tipe, model, gaya perlu dipertajam karena akan menjadi acuan bagi pendidikan

dan pelatihan awak POLRI. Menghadapi tantangan abad ke-21, sekiranya model perpolisian dengan skenario humanistik dan tipe pencegahan dianjurkan untuk dipilih. Terakhir, adalah masalah penempatan POLRI dalam susunan ketatanegaraan. Sebaiknya POLRI berkedudukan sejajar dengan departemen-departemen dan Kejaksaan Agung untuk memberi aksentuasi kepada peranan POLRI sebagai penegak hukum, khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana.

Makna “polisi yang berwatak sipil” dapat dikatakan dengan sederhana sebagai suatu cara perpolisian yang menempatkan pada titik pusat perhatian. Artinya, cara-cara polisi menjalankan pekerjaannya tidak boleh menyebabkan manusia itu kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Menjalankan pekerjaan polisi, seperti menjaga keamanan, menangani kejahatan dan lain-lain adalah satu hal, sedangkan bagaimana cara pekerjaan itu diselesaikan adalah hal yang lain lagi. Oleh karena itu dimensi moral dalam pekerjaan polisi menjadi kental, sebagaimana akan dibicarakan di bawah nanti. Menjadi polisi sipil juga dapat dikatakan menjadi polisi yang menjalankan tugasnya tidak dengan menggunakan cara yang pendek dan gampang, seperti memaksa dan menggunakan kekerasan belaka, tetapi bersedia mendengarkan dan mencari tahu hakikat dari penderitaan manusia.

Muir (1977:4) menggambarkan wacana sipil dari perpolisian. Polisi berwatak sipil membangun dan mengembangkan jaringan pekerjaan dan langkah yang lebih kompleks daripada sekadar “menegakkan hukum”. Hal itu berawal dari jawaban yang menarik

terhadap pertanyaan yang tidak kalah menarik, yaitu “bagaimana dan siapa sesungguhnya polisi yang baik itu?”. Oleh Muir, pertanyaan mendasar itu dijawab dengan kalimat sebagai berikut “*A policeman becomes a good policeman to the extent that he develops two virtues. Intellectually, he has to grasp the nature of human suffering. Morally, he has to resolve contradiction of achieving just ends coercive means.*” Selanjutnya ia membuat penilaian yang bagus bagi seorang polisi yang mampu mengembangkan watak pekerjaan yang demikian itu dengan mengatakan, “*A patrolman who develops this tragic sense and moral equanimity tends to grow in the job, increasing in confidence skill, sensitivity, and awareness*”.

Keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan untuk adanya pelayanan polisi (Suparlan;1999). Fungsi polisi adalah untuk menjaga agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga agar individu, masyarakat, dan negara yang merupakan unsur-unsur utama dalam proses tidak dirugikan. Menurut Satjipto Rahardjo (2000) :”Sosok Polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok masyarakat.

Dengan prinsip tersebut diatas masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, yang berubah dari polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka terhadap dinamika tersebut dan menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan masyarakatnya)

menjadi polisi yang protagonis (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikannya ke dalam tugas-tugasnya) atau yang cocok dengan masyarakatnya. Harapan masyarakat kepada polisi adalah sosok polisi yang cocok atau sesuai dari masyarakatnya dan hal tersebut tidak dapat ditentukan oleh polisi sendiri. Dapat dikatakan bahwa polisi adalah cerminan dari masyarakatnya, masyarakat yang bobrok jangan berharap mempunyai polisi yang baik (Rahardjo, 1999).

Sistem Pendidikan yang dilaksanakan di AKPOL pada saat ini mengacu pada pendidikan Kepolisian Negara RI, yang sebagian telah menransformasi Sistem Pendidikan Nasional. Dengan kata lain belum seluruhnya norma-norma sistem pendidikan nasional terakomodasi dalam sistem pendidikan Kepolisian. Namun upaya-upaya kearah perubahan dengan mengintegrasikan pada Sistem Pendidikan nasional telah ada sekalipun masih bersifat gradual dan dilakukan tahap demi tahap.

Pada dasarnya Sistem Pendidikan Nasional hanya menentukan hal-hal yang bersifat universal dan makro, seperti prinsip-prinsip dasar pendidikan yang berkaitan dengan jenis dan jenjang pendidikan, kurikulum inti yang berwawasan nasional, dan nilai-nilai yang selayaknya dikembangkan. Sedangkan yang menetapkan visi, misi, pola dan struktur pendidikan Polri, penyelenggaraan pendidikan Polri, kebijakan pembinaan dan pengembangan pendidikan Polri ditetapkan dalam sistem pendidikan Kepolisian Negara RI. Dengan demikian tugas utama sistem pendidikan

AKPOL adalah menterjemahkan dan mengelaborasi, serta mewujudkan norma-norma yang telah ditetapkan dalam sistem pendidikan kepolisian. Beberapa norma yang telah ditetapkan dalam sistem pendidikan kepolisian antara lain: visi, misi, penggolongan dan jenis pendidikan, serta tujuannya.

Ada beberapa teori pembelajaran yang berlaku, salah satunya adalah teori konstruktivisme. Sebagai alternative pendekatan baru pembelajaran di Indonesia yang sedang menempatkan reformasi sebagai wacana kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan hanya di bidang pendidikan, melainkan juga di segala bidang. Selama ini, wacana kita adalah behavioristik yang berorientasi pada penyeragaman yang pada akhirnya membentuk manusia Indonesia yang sangat sulit menghargai perbedaan. Perilaku yang berbeda lebih dilihat sebagai kesalahan yang harus dihukum. Perilaku manusia Indonesia selama ini sudah terjangkit virus kesamaan, virus keteraturan, dan lebih jauh virus inilah yang mengendalikan perilaku kita dalam berbangsa dan bernegara.

Longworth (1999) meringkas fenomenan ini dengan menyatakan: 'Kita perlu mengubah fokus kita dan *apa yang perlu dipelajari* menjadi *bagaimana caranya untuk mempelajari*. Perubahan yang harus terjadi adalah perubahan dari *isi* menjadi *proses*. Belajar *bagaimana cara belajar untuk mempelajari sesuatu* menjadi suatu hal yang lebih penting daripada fakta-fakta dan konsep-konsep yang dipelajari itu sendiri'.

Oleh karena itu, pendidikan harus

mempersiapkan para individu untuk siap hidup dalam sebuah dunia di mana masalah-masalah muncul jauh lebih cepat daripada jawaban dari masalah tersebut, di mana ketidakpastian dan ambiguitas dari perubahan dapat dihadapi secara terbuka, di mana para individu memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukannya untuk secara berkelanjutan menyesuaikan hubungan mereka dengan sebuah dunia yang terus berubah, dan di mana tiap-tiap unsur dan kita menjadi pemberi arti dari keberadaan kita.

Pada dasarnya pelaksanaan pendidikan di AKPOL selain melalui kegiatan pengajaran, dilakukan pula pelatihan dan pengasuhan. Pelatihan memiliki peranan penting dalam pembentukan keterampilan dan integritas Kepolisian. Pengajaran merupakan suatu proses untuk memperoleh pengetahuan (*kognitif*), maka latihan dan pengasuhan merupakan pematapan untuk memiliki keterampilan (*psikomotorik*), dan memiliki pembulatan sikap, moralitas dan integritas (*afektif*).

Keterampilan bagi kepolisian merupakan suatu hal yang seharusnya dimiliki, seperti halnya seorang dokter harus memiliki keterampilan di bidang kedokteran, oleh karena itu latihan merupakan suatu keniscayaan yang tidak mungkin ditinggalkan bersama-sama kondisi belajar lainnya.

Terdapat 3 kondisi belajar dalam mempelajari ketrampilan yakni *kontiguitas*, latihan (*practice*), dan balikan (*feedback*). *Kontiguitas* merupakan kondisi simultan stimulus dan respon. Belajar ketrampilan tingkat dasar yang menjadi kontiguitasnya

adalah unit-unit Stimulus-Respon dalam rangkaian, sedangkan pada tingkat yang lebih tinggi merupakan rangkaian yang menyusun pola ketrampilan secara menyeluruh.

Pengasuhan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996) adalah proses, perbuatan dan cara mengasuh. Mengasuh berarti menjaga (merawat dan mendidik), membimbing (membantu, melatih dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri (orang atau negeri), memimpin (mengepalai, menyelenggarakan) suatu badan kelembagaan. Pengasuhan dalam arti sempit yaitu menyelenggarakan segala usaha, dan kegiatan dalam rangka menumbuhkan, mengembangkan, dan memantapkan kepribadian Taruna untuk menjadi Perwira Polri pejuang professional (Gubernur AKPOL, 1999)

Pengasuhan sebagaimana terdapat dalam buku Pedoman Pengasuhan Taruna Akpol (2007), merupakan upaya pendidikan dan pembentukan Taruna Akpol yang berbentuk bimbingan dan penyuluhan dalam rangka menanamkan dan memantapkan nilai-nilai dan pengasuhan pengetahuan akademis dalam rangka pembentukan kepribadian Perwira Tri Brata dan Catur Prasetya dengan titik penekanan pada aspek kejuangan. Kegiatan pengasuhan bagi Taruna Akpol dilakukan untuk mewujudkan kepribadian prajurit bhayangkara yang professional dengan mengembangkan tiga potensi dasar, yaitu mental, intelek dan jasmani.

Kegiatan pengasuhan merupakan bentuk kegiatan Taruna Akpol di luar jam perkuliahan, dan sebagian besar di-

laksanakan di dalam lingkungan kesatrian atau asrama Taruna, meliputi enam bentuk kegiatan; yaitu bidang pembinaan mental spiritual dan ideologi, pembinaan kehidupan kebhayangkaraan, pembinaan kepemimpinan dan kehidupan Korps Taruna, pembinaan olah raga dan kesempataan jasmani, pembinaan kehidupan sosial dan budaya, dan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Terangkum dalam kegiatan harian yang terjadwal, terencana, dan sistematis, maksudnya adalah kegiatan pengasuhan disusun secara terjadwal, dan terdapat pengampu atau yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengasuhan yang disebut dengan pengasuh, bertanggung jawab kepada Kakortaris. Pola pengasuhan pada dasarnya adalah membentuk kepribadian yang dapat mendukung tugas. Polri dituntut bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Tri Brata dan Catur Prasetya (Supriyadi AR, 1999)".

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survey, yang telah memberikan sejumlah informasi mengenai pendidikan/ pengajaran, pengasuhan, pelatihan dan informasi mengenai polisi sipil. Keempat informasi tersebut merupakan data yang kemudian diolah dan dianalisis. Data yang terkumpul selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk dianalisis lebih lanjut guna mencari pengaruh antara Pendidikan/Pengajaran, Pelatihan, dan Pengasuhan terhadap pembangunan Polisi Sipil.

Pengumpulan data telah dilakukan di

Akademi Kepolisian, di mana sasaran penelitian ini adalah Taruna tingkat II dan tingkat III Akademi Kepolisian. Pertimbangan menentukan sasaran Taruna tingkat II dan tingkat III adalah para Taruna baik Tingkat II maupun tingkat III telah mendapatkan pengalaman lebih dari 2 tahun dalam proses pendidikan/pengajaran, pelatihan dan pengasuhan. Dengan demikian mereka dianggap mampu memberikan sejumlah informasi yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

Berdasarkan sasaran penelitian di atas, maka populasi penelitian adalah semua Taruna Akademi Kepolisian tingkat II dan tingkat III. Dengan demikian, populasi tersebut merupakan populasi yang berstrata, di mana strata tersebut terbagi dalam Taruna tingkat II yang berjumlah 300 orang dan tingkat III yang berjumlah 326 orang. Jadi populasi penelitian ini berjumlah 626 orang. Karena populasi penelitian ini berstrata maka sampel yang diambil dilakukan dengan menggunakan teknik *stratified proporsional random sampling*.

Sampel yang diperoleh ditentukan dengan mengambil secara proporsional dengan besaran 15% dari jumlah populasi masing-masing strata. Strata pertama yaitu Taruna tingkat II berjumlah 300 orang, maka diperoleh jumlah sampel dari populasi strata tersebut yaitu 45 orang. Sedangkan strata kedua yaitu Taruna tingkat III dengan jumlah 326 orang, maka diperoleh jumlah sampel dari populasi kedua adalah sebanyak 49 orang. Jumlah total sampel penelitian ini adalah 94 Taruna.

Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini kemudian dikompilasi dan

diolah dengan menggunakan program olah data statistik SPSS. Analisis data yang digunakan menggunakan analisis regresi. Penetapan model analisis ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa variabel-variabel yang diteliti memiliki hubungan yang bersifat fungsional. Pengolahannya dilakukan melalui tiga tahap yaitu uji validitas, reliabilitas, dan uji regresi.

Uji validitas digunakan untuk memastikan apakah alat ukur (*kuesioner*) yang digunakan benar-benar dapat mengukur variabel yang ingin diukur. Daftar pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama berisi 15 item pertanyaan yang menggali informasi mengenai pemahaman para responden terhadap pembangunan Polisi Sipil. Bagian kedua berisi 10 item pertanyaan yang menggali informasi mengenai pemahaman responden tentang Pendidikan/Pengajaran. Bagian ketiga dengan 10 item pertanyaan yang menggali informasi tentang pemahaman terhadap Pelatihan dan bagian keempat berisi 10 item pertanyaan yang menggali informasi mengenai Pengasuhan. Uji validitas menggunakan *Pearson Correlation*, dengan ketentuan item pertanyaan tidak valid adalah bila *corrected item total correlation*-nya kurang dari 0,367.

Reliabilitas suatu pengukuran menunjukkan stabilitas dan konsistensi instrumen dalam mengukur konstruk dan membantu menafsirkan kebaikan alat pengukuran. Reliabilitas konsistensi interitem (*interitem consistency reliability*) menunjukkan konsistensi dari jawaban-jawaban responden pada semua item dalam suatu ukuran. Sampai pada bahwa item-item

pertanyaan itu merupakan ukuran-ukuran yang *independen* dari konsep yang sama, mereka tidak akan berhubungan satu dengan yang lain.

Metode yang digunakan dalam pengujian hipotesis ini adalah dengan menggunakan metode regresi. Uji regresi ditujukan untuk uji signifikansi pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen* dalam suatu model. Analisis regresi dilakukan dua tahap, tahap pertama dilakukan regresi antara variabel Pendidikan/Pengajaran, Pelatihan, dan Pengasuhan sebagai variabel *independen* dengan variabel Polisi Sipil sebagai variabel *dependen*.

Signifikansi parameter individual (uji t) berguna untuk menunjukkan pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variansi variabel terikat. Sedangkan uji F dilakukan untuk menunjukkan pengaruh secara bersama-sama semua variabel bebas dalam suatu model terhadap variansi variabel terikatnya.

Di samping itu, analisis terhadap koefisien determinasi ( $R^2$ ) juga dilakukan. Koefisien ini pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel terikat.  $R^2$  menunjukkan proporsi total jumlah kuadrat yang diterangkan oleh variabel *independen* dalam model. Nilai koefisien determinasi berada di antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel *independen* dalam menjelaskan variansi variabel *dependen* amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel *independen* memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variansi variabel *dependen*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang menggambarkan kondisi pendidikan/pengajaran di Akademi Kepolisian dianggap sesuai oleh para Taruna Akademi Kepolisian tingkat II dan tingkat III. Mekanisme pembelajaran yang dilakukan di Akademi Kepolisian telah mengikuti kaidah-kaidah pembelajaran kekinian. Kaidah-kaidah ini dapat dilihat dari penerapan kurikulum, pengajar memberikan keterbukaan terhadap rencana pembelajaran dengan menunjukkan beberapa administrasi pengajar seperti Silabus, SAP dan Bahan Ajar, pengajar menyampaikan informasi terkait dengan kompetensi apa yang harus dicapai oleh para Taruna Akademi Kepolisian, pengajar memberikan motivasi dalam proses pembelajaran, pengajar menerapkan metode pembelajaran dan media yang bervariasi dari pengajar serta penilaian proses pembelajaran juga tidak lupa dilakukan oleh pengajar. Sebanyak 49% butir-butir tersebut bagi para Taruna Akademi Kepolisian dianggap telah dilakukan dan sesuai dengan sebagaimana yang diharapkan dalam proses pembelajaran. Sebanyak 22% Taruna Akademi Kepolisian menganggap pembelajaran sudah sangat sesuai dilakukan oleh para pengajar. Sedang sisanya para Taruna Akademi Kepolisian menjawab pembelajaran cukup sesuai sebanyak 21% dan kurang sesuai sebanyak 7%.

Hasil penelitian mengenai sistem pelatihan di Akademi Kepolisian me-

nunjukkan gambaran bahwa sistem pelatihan di Akademi Kepolisian dirancang untuk membekali para Taruna Akademi Kepolisian dapat menjalankan fungsi-fungsinya dalam lapangan dengan mengedepankan watak sipil. Rancangan sistem pelatihan dari para instruktur/pelatih Akademi Kepolisian dianggap oleh para Taruna Akademi Kepolisian telah diterapkan dengan baik di mana kriterianya adalah 49% para instruktur/pelatih mampu menjalankan/menerapkan rancangan sistem pelatihan tadi kepada para Taruna Akademi Kepolisian dengan baik. Sebanyak 17% instruktur/pelatih dianggap oleh para Taruna Akademi Kepolisian sangat mampu melaksanakan tugas melatih dengan menekankan pada prinsip profesionalisme sebagai polisi sipil. Para Taruna Akademi Kepolisian menganggap 23% instruktur/pelatih cukup mampu memberikan dukungan kepada Taruna Akademi Kepolisian untuk dapat menjalankan tugas sebagai polisi sipil. Sisanya 11% Taruna Akademi Kepolisian menganggap instruktur/pelatih kurang mampu memberikan kepada mereka pelatihan yang berorientasi pada latihan dan ketrampilan untuk menjadi polisi sipil.

Hasil penelitian kepada para Taruna Akademi Kepolisian tingkat II dan tingkat III mengenai sistem pengasuhan menunjukkan gambaran di mana sistem pengasuhan yang berorientasi pada penanaman watak polisi sipil dinilai telah dilaksanakan dengan baik. Sebanyak 48% para Taruna memberikan jawaban baik terhadap sistem pengasuhan yang berlaku di Akademi Kepolisian. Pengasuhan dilaksanakan dengan megacu pada kurikulum yang jelas terutama

mencakup aspek jasmani dan rohani. Model pembimbingan yang dikembangkan para pendamping dalam proses pengasuhan dilakukan dengan bijak, penuh keseran dan empati selain itu bahan yang digunakan dalam proses pengasuhan juga merupakan landasan yang nantinya dipakai oleh Taruna Akademi Kepolisian dalam melaksanakan tugas-tugas fungsional di masyarakat. Sebanyak 29% Taruna menganggap bahwa pengasuhan sudah dijalankan dengan sangat baik karena metode pengasuhan sesuai aturan. Sedang sisa prosentasi lainnya adalah 15% Taruna menganggap cukup baik sistem pengasuhan di Akademi Kepolisian dan hanya 7% saja Taruna yang menjawab sistem pengasuhannya kurang baik.

Terkait dengan variabel Pembangunan Polisi Sipil hasil penelitian menunjukkan bahwa 46% Taruna Akademi Kepolisian memahami dengan baik pembangunan polisi sipil yang dibudayakan di lingkungan kampus. Para Taruna Akademi Kepolisian menganggap bahwa pergeseran dari watak militerisme dan berubahnya polisi menjadi institusi penegak hukum yang profesional telah dipahami dengan sangat baik, di mana hal itu ditunjukkan dengan persentase sebanyak 32%. Aspek yang berkenaan dengan pembangunan polisi sipil yang dilakukan di Akademi Kepolisian dengan proses sosialisasi terhadap para Taruna untuk dapat menjadi anggota Polri yang mengedepankan etika kepolisian seperti bersikap sopan, santun, tertib, bermoral serta menuasai diri dan bertindak sabar serta bijak cukup dipahami oleh mereka. Sebanyak 18% taruna menyatakan cukup memahami, dan hanya 4% saja taruna yang kurang

memahami pembangunan polisi sipil yang diterapkan oleh Akademi Kepolisian.

Berdasarkan hasil hitungan statistik dengan taraf signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa  $F_{hitung} = 23,916$  lebih besar dibanding  $F_{tabel} = 3,943$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tiga variabel bebas yang terdiri dari pendidikan/pengajaran, pelatihan dan pengasuhan mempengaruhi variabel terikat, yaitu Polisi Sipil. Di mana sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan/pengajaran, pelatihan dan pengasuhan memberikan kontribusi yang positif terhadap proses membangun watak Polisi Sipil kepada para Taruna di Akademi Kepolisian.

### **Pembahasan**

Polisi sipil, selain sebagai paradigma, juga merupakan tujuan dari reformasi di lingkungan Polri. Oleh karena itu, pada dasarnya perubahan-perubahan yang dilaksanakan tidak dapat dilakukan secara parsial tetapi secara simultan, sehingga akan menghasilkan sinergi yang menjadi percepatan dalam mencapai tujuan yaitu terwujudnya polisi sipil. Beberapa parameter yang menjadi indikator polisi sipil, yakni: profesional dan proposional, demokratis, menjunjung tinggi HAM, transparan, akuntabel, menjunjung tinggi supremasi hukum dan bersikap protagonis.

Dalam rangka mengembangkan dan upaya pementapan profesi kepolisian itu diupayakan melalui pengajaran dan pendidikan untuk calon polisi maupun calon perwira polisi. Salah satu institusi pendidikan yang dapat menjadi wadah pembelajaran guna mentransformasikan

pegetahuan sikap dan watak polisi yang professional adalah Akademi Kepolisian. Akademi Kepolisian merupakan wadah yang menghasilkan para calon Perwira Polisi yang ahli dan professional serta menjadikan polri sebagai aparat publik berwatak sipil itu. Dalam proses dinamika sebagai institusi pendidikan Akademi Kepolisian menggunakan sistem pendidikan yang mengacu pada pendidikan Kepolisian Negara RI, yang sebagian telah mentransformasi Sistem Pendidikan Nasional. Dengan kata lain belum seluruhnya norma-norma sistem pendidikan nasional terakomodasi dalam sistem pendidikan Kepolisian.

Pada dasarnya Sistem Pendidikan Nasional hanya menentukan hal-hal yang bersifat universal dan makro, seperti prinsip-prinsip dasar pendidikan yang berkaitan dengan jenis dan jenjang pendidikan, kurikulum inti yang berwawasan nasional, dan nilai-nilai yang selayaknya dikembangkan. Sementara dalam sistem pendidikan Polri penetapan visi, misi, pola dan struktur pendidikan Polri, penyelenggaraan pendidikan Polri, kebijakan pembinaan dan pengembangan pendidikan Polri dilakukan dalam sistem pendidikan Kepolisian Negara RI. Dengan demikian, tugas utama sistem pendidikan Akademi Kepolisian adalah menterjemahkan dan mengelaborasi, serta mewujudkan norma-norma yang telah ditetapkan dalam sistem pendidikan kepolisian. Beberapa norma yang telah ditetapkan dalam sistem pendidikan kepolisian antara lain: visi, misi, penggolongan dan jenis pendidikan, serta tujuannya.

Visi pendidikan Polri adalah mewujudkan personil Polri yang memahami jati dirinya sebagai insan Polri, memiliki integritas moral yang tinggi, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi Kepolisian serta profesional dalam penerapannya, dengan didukung jasmani yang samapta. Sedangkan misi pendidikan Polri, yakni: Membentuk masyarakat umum terpilih untuk menjadi personil Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui pendidikan Polri; Memberikan pembekalan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian kepada seluruh personil dan calon personil Polri maupun anggota masyarakat lainnya yang mengemban tugas kamtibmas/Kepolisian terbatas; Meningkatkan kualitas peserta didik dan penyelenggaraan pendidikan, sehingga mampu mengoptimalkan pembentukan kepribadian Polri yang bermoral agama, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi Kepolisian, mengerti serta memperhatikan kebutuhan masyarakat; Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan profesional Kepolisian maupun pendidikan lainnya yang bermutu bagi seluruh personil Polri; Meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas lembaga pendidikan Polri, sehingga mampu menjadi pusat pembudayaan/kulturalisasi kode etik Polri, pusat ilmu pengetahuan dan teknologi Kepolisian Republik Indonesia, pusat ketrampilan, sikap, nilai, dan pengalaman profesionalisme Kepolisian serta pusat pemupukan kepribadian Polri yang bermoral agama.

Visi dan misi di atas merupakan acuan dalam penyelenggaraan arah kebijakan institusi tersebut. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di Akademi Kepolisian, visi misi tersebut diejawantahkan dalam proses pembelajaran dengan membekali Taruna Akademi Kepolisian melalui aspek kognitif atau cipta, aspek afektif atau karsa dan psikomotorik atau karya. Kemampuan kognitif dikembangkan dalam ranah belajar mengajar di tempat kuliah. Kemampuan psikomotorik dikembangkan pada kegiatan pelatihan di lapangan, sedangkan kemampuan afektif dikembangkan dalam ranah kegiatan pengasuhan. Ketiga kegiatan yang diberikan kepada Taruna Akpol yaitu pendidikan/pengajaran, pelatihan dan pengasuhan, merupakan kegiatan pendidikan yang holistik, simultan dan berkesinambungan. Diselenggarakan dalam rangka mengarahkan para Taruna untuk "*knowing to good, loving the good and acting the good*". Dalam konteks ini maka para Taruna diberikan kegiatan pembelajaran, pengasuhan dan pelatihan agar tahu, cinta dan memiliki perilaku polisi sipil yang baik.

Pada ranah belajar mengajar di tempat kuliah, Akademi Kepolisian telah melakukan penataan sistem pendidikan melalui: Menata ilmu pengetahuan yang harus dimiliki Polisi untuk menghasilkan output perwira Kepolisian yang bertaqwa, memiliki integritas moral, maka diperlukan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembentukan mental sebagai anggota kepolisian. Ilmu pengetahuan tersebut sebagaimana ditetapkan sistem pendidikan nasional dan sistem pendidikan Kepolisian

Negara RI, yakni pendidikan Agama, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan etika kepolisian. Hal yang paling urgen dalam penciptaan tersebut adalah metode pembelajarannya, yang dalam hal ini AKPOL telah menetapkan melalui proses belajar dan pengasuhan. Pendidikan tersebut akan mendorong pula pada keyakinan akan kebenaran pekerjaan (profesi) sebagai seorang polisi.

Menata ilmu pengetahuan yang harus dimiliki Polisi yang berkaitan dengan pekerjaan utamanya yakni melakukan penegakan hukum dalam kerangka melindungi, mengayomi, membimbing, dan melayani masyarakat, agar tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu seorang anggota Polisi, terlebih seorang Perwira harus memiliki ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penegakan hukum. Ilmu pengetahuan yang dibutuhkan adalah ilmu pengetahuan hukum. Berdasarkan kurikulum inti matakuliah ilmu hukum yang diberikan kepada Perwira polisi setidaknya mengandung mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK), dan mata kuliah keahlian (MKK). Melihat tantangan dan hakekat ancaman yang akan dihadapi Perwira Polisi yang berada pada *first line supervisor*, maka ilmu hukum diarahkan pada pengembangan diferensiasi MKK yang bersifat khusus, seperti: Hukum pidana, Hukum Pidana internasional, Hukum Pidana Dalam Bisnis, Hukum Perburuhan, Hukum Acara Pidana, Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, dan lain-lain; disamping mata kuliah yang bersifat dasar seperti: Pengantar ilmu hukum, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Sistem peradilan,

Asas-asas hukum Pidana. Metode yang digunakan adalah metode belajar dan praktik berupa mengikuti persidangan di pengadilan.

Menata ilmu pengetahuan yang harus dimiliki polisi profesional yaitu polisi yang memiliki kemampuan dan ketrampilan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian. Iptek yang sangat urgen dengan kemampuan tersebut antara lain: Fungsi Teknis Kepolisian (FT Intel, Sabhara, Reserse, Lantas, Bimmas), Identifikasi kepolisian, Diskresi Kepolisian, Labfor/Kriminalistik, Kedokteran Forensik, Pengetahuan Brimob, Pengetahuan Pol Airud, Menembak, dan Negosiasi. Selain itu, teknologi-teknologi yang berkaitan dengan kemampuan tersebut penting dikuasai, yakni teknologi persenjataan, teknologi penyelidikan dan penyidikan, teknologi peralatan keamanan lainnya, teknologi kendaraan, teknologi forensik kriminalistik, teknologi audio visual, teknologi kedokteran forensik, teknologi perkapalan dan pesawat terbang, dan lain-lain. Hal yang terpenting untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut adalah metode pembelajaran, yang berupa metode belajar dan latihan.

Menata ilmu pengetahuan yang harus dimiliki Polisi untuk menghasilkan perwira Polisi yang memiliki kemampuan memimpin dan mengelola organisasi Kepolisian pada *first line supervisor*, maka diperlukan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kepemimpinan dan manajemen, yang antara lain Dasar-dasar Manajemen, Kepemimpinan, MOP, Manajemen training, Pembinaan personil, Pembinaan logistik,

dan pembinaan keuangan.

Menata ilmu pengetahuan lainnya yang harus dimiliki oleh polisi profesional. Seorang polisi profesional dalam menjalankan tugasnya akan berupaya seefektif dan seefisien mungkin, untuk itu selain harus memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diuraikan di atas, seorang polisi harus mengenali, memahami lingkungannya dan masyarakat yang menjadi subyek sekaligus obyek kepolisian (yang dilindungi, diayomi, dan dilayani). Ilmu pengetahuan yang cukup relevan antara lain: Sosiologi, Antropologi, Budaya, Ilmu Politik dan Pemerintahan, Psikologi Sosial, Komunikasi Sosial, kriminologi, dan lain-lain.

Menata dan mengembangkan ketrampilan lain yang harus dimiliki polisi yang menunjang efektivitas dan efisiensi, seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Kemampuan komputer, mengetik, Metode Penelitian, dan mengemudi. Keterampilan bagi kepolisian merupakan suatu hal yang seharusnya dimiliki, seperti halnya seorang dokter harus memiliki keterampilan di bidang kedokteran, oleh karena itu latihan merupakan suatu keniscayaan yang tidak mungkin ditinggalkan bersama-sama kondisi belajar lainnya.

Pada ranah psikomotorik yang harus diberikan kepada para Taruna Akademi Kepolisian sebagai bekal dalam upaya mensinergikan dengan pembelajarannya yang di dapat pada ranah kognitif, maka perlu dikembangkan kegiatan pelatihan. Latihan pada dasarnya suatu kondisi eksternal, yakni pengulangan suatu respons dalam penyajian stimuli. Latihan berfungsi

sebagai balikan dan penguatan, serta merupakan kondisi yang diperlukan untuk mengembangkan ketrampilan yang kompleks. Dengan demikian latihan merupakan suatu cara untuk: Menyajikan kembali tugas-tugas/materi pelajaran yang telah dipelajari secara sebagian. Mengkoordinasi tugas-tugas/materi pelajaran agar tersusun dalam urutan dan timing yang tepat. Mencegah supaya tugas/materi pelajaran tidak terlupakan, dan Mengembangkan sampai tahap autonomus.

Dengan melihat tuntutan profesionalisme polisi saat ini seperti sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat dalam menegakkan hukum untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yang memerlukan keahlian dan ketrampilan di bidang kepolisian, maka dalam rangka membentuk ketrampilan mulai dari kognisi, fiksasi, sampai dengan *otonomus* diperlukan latihan. Akademi Kepolisian sebagai lembaga pendidikan yang berfungsi untuk mentransformasikan dan menginternalisasikan ketrampilan yang diperlukan polisi dalam proses pembelajarannya berupaya untuk memberikan berbagai latihan yang diperlukan dengan frekuensi yang tinggi dan waktu relative intens.

Aspek lain dalam kerangka mengoptimalkan profesionalisme calon perwira polisi di Akademi Kepolisian adalah melalui ranah afektif. Di mana ranah afektif ini dapat dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan pengasuhan yang telah dilakukan di Akademi Kepolisian. Pengasuhan sebagaimana terdapat dalam buku Pedoman Pengasuhan Taruna Akpol (2007),

merupakan upaya pendidikan dan pembentukan Taruna Akpol yang berbentuk bimbingan dan penyuluhan dalam rangka menanamkan dan memantapkan nilai-nilai dan pengasuhan pengetahuan akademis dalam rangka pembentukan kepribadian Perwira Tri Brata dan Catur Prasetya dengan titik penekanan pada aspek kejuangan. Kegiatan pengasuhan bagi Taruna Akpol dilakukan untuk mewujudkan kepribadian prajurit bhayangkara yang professional dengan mengembangkan tiga potensi dasar, yaitu mental, intelek dan jasmani.

Kegiatan pengasuhan diberikan Taruna Akpol di luar jam perkuliahan, dan sebagian besar dilaksanakan di dalam lingkungan kesatrian atau asrama Taruna, meliputi enam bentuk kegiatan; yaitu bidang pembinaan mental spiritual dan ideologi, pembinaan kehidupan kebhayangkaraan, pembinaan kepemimpinan dan kehidupan Korps Taruna, pembinaan olah raga dan kesempatan jasmani, pembinaan kehidupan sosial dan budaya, dan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Terangkum dalam kegiatan harian yang terjadwal, terencana, dan sistematis, maksudnya adalah kegiatan pengasuhan disusun secara terjadwal, dan terdapat pengampu atau yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengasuhan yang disebut dengan pengasuh, bertanggung jawab kepada Kakortaris. Pola pengasuhan pada dasarnya adalah membentuk kepribadian yang dapat mendukung tugas.

Kegiatan pengasuhan diarahkan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka menanamkan dan memantapkan nilai-nilai kebudayaan bangsa

serta penguasaan akademik dengan tujuan membentuk kepribadian bhayangkara dengan menitikberatkan aspek kejuangan. Pengasuhan dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa kepribadian merupakan suatu totalitas sistem *psiko phsikis* yang utuh dan bulat, yang komponen-komponennya hanya dapat dibeda-bedakan tetapi dapat dipisah-pisahkan. Oleh karenanya pengasuhan tidak boleh dilaksanakan secara terkotak-kotak dan terpisah-pisah. Dalam pengasuhan harus senantiasa memperhatikan bahwa pada hakikatnya anak didik atau yang disebut Taruna memiliki potensi untuk membentuk dirinya sendiri. Pengasuhan dilakukan hanya untuk membantu dan mengarahkan pada Taruna agar dalam pengembangan dirinya dapat berlangsung secara harmonis, sehingga dapat terwujud sifat, sikap, dan tingkah laku yang berjiwa diri sebagai bhayangkara pejuang profesional.

Bagi Taruna Akpol, pengasuhan dilaksanakan bertujuan untuk membentuk, menumbuhkembangkan dan memantapkan kepribadian yang memiliki semangat juang tinggi selaku insan bhayangkara yang mampu meresapi dan mengamalkan nilai-nilai kebudayaan bangsa dalam pelaksanaan tugasnya sebagai alat negara penegak hukum, pengayom, dan pembimbing masyarakat. Sedangkan sasaran dari kegiatan pengasuhan adalah; Tercapainya kedewasaan watak sebagai kepribadian prajurit bhayangkara profesional, tercapainya kemampuan olah pikir di bidang pengetahuan dan ketrampilan, Tercapainya pembentukan postur tubuh, terpeliharanya kesegaran jasmani dan dikuasainya

ketangkasan jasmani, Tercapainya kesamptaan fisik dan keterampilan olah raga yang memadai dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas.

Dalam kegiatan pengasuhan yang dilaksanakan oleh Taruna Akademi Kepolisian, terdapat berbagai unsur atau elemen dalam pola pengasuhan. Pertama adalah pedoman pengasuhan yang dijadikan kerangka acuan dalam pelaksanaan pengasuhan. Elemen kedua adalah pengasuh, yaitu para pengasuh yang keberadaannya setiap saat bersama-sama dengan Taruna. Seperti pengasuh langsung yang mempunyai wewenang komando, antara lain Kadentar, Dankitar, dan Dantontar yang setiap saat bersama-sama dengan Taruna. Ketiga adalah unsur Taruna atau yang diasuh, terdiri dari Taruna tingkat I, II dan III. Dari interaksi antara pengasuh dengan yang diasuh/Taruna, maka terbentuk pola hubungan antara pengasuh dengan Taruna. Unsur lain yang turut menunjang dalam pelaksanaan pengasuhan, adalah interaksi Taruna dengan masyarakat lain, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Taruna untuk dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Model penghargaan yang diterapkan kepada Taruna Akpol, merupakan ganjaran dan hukuman sebagai sanksi atas nilai-nilai positif dan negative yang dilakukan oleh Taruna.

Ketiga ranah di atas baik ranah kognitif dalam proses pembelajaran/ pendidikan, ranah psikomotorik dalam kaitannya dengan pelatihan berbagai keterampilan dan ranah afektif dalam kaitannya dengan pengasuhan serta pembinaan memiliki tujuan yang saling terintegrasi untuk mewujudkan sosok polisi

yang sempurna. Pendidikan/pengajaran, pelatihan dan pengasuhan yang menjadi dasar dalam sistem pendidikan di Akademi Kepolisian merupakan jantung bagi perkembangan polisi yang profesional di masa mendatang. Upaya untuk mempertajam sistem pendidikan/pengajaran, pelatihan dan pengasuhan dalam rangka mewujudkan polisi sipil juga merupakan sebuah faktor penting pembangun yang efektif dan efisien bagi Polisi yang lebih berwatak sipil. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa dalam proses membangun Polisi Sipil dipengaruhi oleh aspek-aspek pendidikan/pengajaran, pelatihan dan pengasuhan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

Dari hasil penelitian menunjukkan pembangunan polisi sipil dapat dilakukan melalui proses pendidikan/pengajaran, pelatihan dan pengasuhan kepada Taruna Akademi Kepolisian. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga variabel *independen* secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pembangunan polisi sipil. Pendidikan/pengajaran, pelatihan dan pengasuhan secara bersama-sama memberikan dukungan atau kontribusi terhadap pembangunan polisi sipil dengan taraf signifikansi 0,05 dengan F hitung = 23,916 lebih besar dibanding F tabel = 3,943. Dengan demikian, pembangunan polisi sipil dapat dimulai dan dibentuk melalui penerapan sistem pendidikan/pengajaran, pelatihan dan pengasuhan yang

mengedepankan prinsip-prinsip watak polisi sipil kepada para Taruna Akademi Kepolisian.

Untuk membangun polisi sipil, maka Tenaga pendidik (Gadik)/Dosen, instruktur/pelatih secara konsisten harus benar-benar menjalankan tugasnya dalam bidang pendidikan/ pengajaran, pelatihan dan pengasuhan kepada para Taruna Akademi Kepolisian dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip polisi sipil. Dengan demikian, di masa mendatang 3 hal tadi dapat menjadi pedoman/acuan dalam mewujudkan para Taruna Akademi Kepolisian menjadi polisi yang berwatak sipil.

#### DAFTAR RUJUKAN

- AKPOL. 2009. *Evaluasi Latjarsuh Taruna Angkatan 42. Laporan Penelitian*. Semarang: Akpol.
- AKPOL. 2010. *Evaluasi Program Pendidikan AKPOL tahun 2010*.
- Anonim. 2008. *Undang-Undang dan Peraturan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Visi media.
- Bailey, David H. 1994. *Police for the Future*. New York dan Oxford: Oxford University Press.
- Colby, Anne. 2008. *Fostering the Moral and Civic Development of College Students*, dalam *The Handbook of Character Education*, ed. Larry P. Nuccy dan Darcia Narvaez, New York: Routledge.
- Djamin, Awaloedin. 1995. *Administrasi Kepolisian*. Bandung: Sanyata Sumanasa Wira, Sespim Polri
- Dwilaksana, Chryshnanda. 2009. *Membangun Polri Sebagai Polisi Sipil Dalam Masyarakat yang Demokratis*.
- Iskandar, Dadang. 2007. *Profesionalisme "Polisi Sipil"*.
- Kadarmanta, A. 2008. *Pendidikan Polisi Berbasis Kompetensi*. Jakarta: PT. Forum Media Utama.
- KIK. Universitas Indonesia. 2004. *Laporan Hasil Seminar Dalam Rangka Sewindu Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia*. Jakarta: KIK UI.
- Klann, Gene. 2007. *Building Character: Strengthening the Heart of Good Leadership*, San Francisco: John Wiley and Sons.
- Kunarto. 1997. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: PT. Cipta Manunggal.
- Langworthy, Robert H., Travis, Lawrence F. 1994. *Policing in America - A Balance of Forces*. New York: Macmillan.
- Lebang, 1. 2003. *Idealisme Tampilan Akademi Kepolisian Menuju pada Etalase Pendidikan Polisi Profesional*. Semarang: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian.
- Leonard. V.A. and Harry W. More. 1987. *Police Organization and Management*. New York: The Foundation Press. Inc.
- Lickona, Thomas. 1996. *Eleven Principles*

- of Effective Character Education, dalam Journal of Moral Education.*
- Muradi. 2009. *Penantian Panjang Reformasi POLRI*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Rahardjo, Satjipto. 2002. *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Skolnick-, J.H. 1975. *Justice Whitout Trial*. New York: John Wiley & Sons.
- Subagyo. 2009. *Membangun Kultur Kepolisian Indonesia*. Laporan Penelitian. Semarang: FIS UNNES.
- Subagyo. 2010. *Reformasi POLRI Sebagai Polisi Sipil*. Laporan Penelitian. Semarang: FIS UNNES.
- Sullivan, L. 1977. *Introduction to Police Science*. New York: McGraw-Hill.
- Suparlan, Parsudi. 2004. *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Suparlan, Parsudi. 2008. *Dari Masyarakat Majemuk Menuju Masyarakat Multikultural*. Jakarta: YPKIK.
- Tabah, Anton. 2001. *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: Mitra Hardhasuma.
- Tabah, Anton. 1998. *Reformasi Kepolisian*. Klaten: CV. Sahabat.
- Tap MPR No. VI dan VII tahun 2000
- Tim Pokja Reformasi Polri. 1999. *Reformasi Menuju Polri yang Profesional*. Jakarta Tim PRP.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Walker, Samuel. 1992. *The Police in America: An Introduction*. New York: Mcgraw-Hill, Inc.
- Yunanto.S. 2009. “*Polisi Sipil*”